

ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA KECAMATAN KOTA DEPOK 2025

Kerjasama:



Sekolah
Sains Data, Matematika,
dan Informatika



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok

**Analisis Pembangunan
Manusia Kecamatan
Kota Depok 2025**

Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan Kota Depok 2025

Ukuran Buku / <i>Book Size</i>	: 21,0 cm × 29,7 cm
Jumlah halaman / <i>Total size</i>	: 52 halaman / <i>52 pages</i>
Naskah / <i>Manuscript</i>	: Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika – IPB University
Gambar kulit dan Seting / <i>Cover design and Setting</i>	: Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika – IPB University
Diterbitkan oleh / <i>Published by</i>	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya
May be cited with the reference to the sources

KATA SAMBUTAN

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, buku Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan Kota Depok 2025 dapat diterbitkan.

Buku Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan Kota Depok 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan Kota Depok, khususnya untuk bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan di kecamatan. Buku ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik masyarakat maupun institusi pemerintah dan swasta.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika – IPB University (SSMI-IPB) yang telah menyusun Buku Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan Kota Depok 2025, begitu juga kepada semua pihak yang sudah berperan dalam penerbitan buku ini.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Depok, Oktober 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Depok,



Drs. Manto, M.Si

NIP. 19670504 198612 1 002

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pembangunan ekonomi menjadi pusat perhatian dalam melihat kemajuan suatu wilayah karena dipandang berhubungan dengan kemampuan pemenuhan hajat hidup masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencermati perkembangan pembangunan ekonomi di suatu daerah, dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Buku Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan Kota Depok Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menyediakan estimasi data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode baru di 11 (sebelas) kecamatan di Kota Depok. Nilai IPM tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan kualitas penduduk di masing-masing kecamatan. Hasil kajian dan analisis pada buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan pembangunan manusia antar kecamatan.

Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kota Depok, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika yang memberikan kepercayaan kepada Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika – IPB University, untuk bekerjasama menyusun buku ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak lain yang menjadi sumber data utama dalam kajian ini.

Atas nama Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika – IPB University, kami menghaturkan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan dan hasil yang diperoleh. Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan secara umum di Kota Depok.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bogor, Oktober 2025
Dekan Sekolah Sains Data, Matematika, dan
Informatika – IPB University,



Prof. Dr. Ir. Agus Buono, M.Si, M.Komp
NIP. 19660702 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Target Kinerja Keluaran	7
2 METODOLOGI	9
2.1 Kerangka Pikir	9
2.2 Metodologi Survey	10
2.2.1 Penyusunan Instrumen Survei	10
2.2.2 Pemilihan Lokasi dan Objek Survei	11
2.2.3 Metode Pengumpulan Data	15
2.3 Metode Penjaminan Mutu Data	17
2.3.1 Persiapan Survei	18
2.3.2 Pelaksanaan Survei	18
2.3.3 Entri Data	19
2.4 Analisis Data	19
2.4.1 Statistika Deskriptif	19
2.4.2 Pendugaan Langsung Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Kota	20
2.4.3 Pendugaan Tidak Langsung IPM Tingkat Kecamatan Melalui	
Metode <i>Small Area Estimation</i> (SAE)	20
2.4.4 Pendugaan Tidak Langsung IPM Tingkat Kecamatan melalui	
Analisis Tren Runtun Waktu menggunakan <i>Exponential Smoothing</i>	22
2.5 Kebutuhan Data untuk Penghitungan IPM Level Kecamatan	22
2.5.1 Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia	25
3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KECAMATAN DI KOTA DEPOK	27

3.1	Urgensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	27
3.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok	28
3.2.1	Perkembangan Umur Harapan Hidup di Kota Depok	31
3.2.2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	32
3.2.3	Rata-rata Lama Sekolah di Kota Depok	34
3.2.4	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	35
3.3	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok dan Kecamatan	37
3.4	Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Depok . .	39
4	Penutup	43
4.1	Kesimpulan	43
4.2	Saran	44
	DAFTAR PUSTAKA	47

DAFTAR TABEL

2.1	Data Sekunder dan Sumber Data	11
2.2	Sebaran Banyak Kelurahan Setiap Kecamatan di Kota Depok	13
2.3	Sebaran Responden yang Ditetapkan untuk Setiap Kelurahan	14
2.4	Sumber Data dalam Pengukuran IPM	23
3.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok dan Komponennya Tahun 2019–2025	30
3.2	Umur Harapan Hidup Kota Depok Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019–2025 (dalam Tahun)	32
3.3	Harapan Lama Sekolah di Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2019–2025 (dalam Tahun)	33
3.4	Rata-rata Lama Sekolah di Kota Depok Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019–2025 (dalam Tahun)	34
3.5	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2019–2025 (dalam Rp. Ribu)	36
3.6	Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan di Kota Depok Tahun 2019–2025	37

DAFTAR GAMBAR

2.1	Desain Penentuan Objek Survei dan Lokasinya	12
2.2	Hubungan antara ukuran contoh (sampel) dengan kesalahan pendugaan (error).	16
2.3	Skema <i>multistage random sampling</i>	17
3.1	IPM Tiap Kecamatan di Kota Depok Tahun 2025	38

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan inti dari proses pembangunan nasional yang menempatkan manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan. Hal ini berarti bahwa manusia bukan hanya penerima hasil pembangunan, melainkan juga pelaku utama yang menentukan arah dan keberhasilan pembangunan itu sendiri. Peningkatan mutu sumber daya manusia menjadi suatu **keharusan strategis** bagi Kota Depok, karena hanya dengan manusia yang sehat, terdidik, dan berdaya saing tinggi, Kota Depok dapat menghadapi tantangan global secara tangguh dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, tanggung jawab pembangunan manusia tidak hanya berada di pundak pemerintah semata, melainkan juga menjadi bagian dari tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, baik keluarga, lembaga pendidikan, dunia usaha, maupun komunitas sosial. Pemerintah berperan dalam menyediakan kebijakan, regulasi, dan fasilitas pendukung, sementara masyarakat turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian, pembangunan manusia harus dipandang sebagai upaya kolaboratif yang menuntut keterlibatan aktif dari berbagai pihak.

Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Konsep ini sejalan dengan gagasan *enlarging the choice of people*, yaitu memperluas pilihan-pilihan hidup agar setiap individu memiliki kebebasan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang bermakna.

Otonomi daerah yang berjalan sejak era reformasi membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam menentukan arah pembangunan wilayahnya. Kondisi ini juga mendorong munculnya kompetisi positif antarwilayah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, perubahan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak dapat dicapai secara instan. Peningkatan IPM merupakan proses jangka panjang

yang memerlukan kesinambungan program, konsistensi kebijakan, serta pemantauan yang berkelanjutan.

Pemerintah Kota Depok sebagai salah satu daerah perkotaan dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui berbagai program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, kajian mengenai perkembangan IPM hingga tingkat kecamatan menjadi penting untuk memahami sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dan tantangan yang masih dihadapi.

Kemampuan suatu bangsa dalam menghadapi tantangan global sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Bangsa yang memiliki SDM unggul akan mampu berdaya saing tinggi, adaptif terhadap perubahan, dan inovatif dalam memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing tersebut, arah pembangunan nasional perlu menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Artinya, aspek peningkatan kualitas manusia harus menjadi perhatian di seluruh sektor pembangunan, baik ekonomi, sosial, pendidikan, maupun kesehatan.

Secara konseptual, pembangunan manusia bertujuan untuk memperluas pilihan dan kesempatan hidup layak bagi setiap individu (*enlarging the choice of people*). Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, serta memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi agar daya beli masyarakat meningkat. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manusia dapat mengembangkan potensinya secara optimal.

Dalam konteks otonomi daerah, proses desentralisasi memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengelola potensi wilayahnya secara lebih aktif, kreatif, dan mandiri. Kompetisi antarwilayah kini menjadi semakin dinamis, mendorong munculnya inovasi kebijakan pembangunan manusia yang lebih efektif dan efisien. Tinggi rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah mencerminkan sejauh mana kebijakan dan program pembangunan tersebut berhasil meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

Namun demikian, perlu disadari bahwa peningkatan IPM tidak dapat dicapai secara instan. Pembangunan manusia adalah sebuah proses jangka panjang yang memerlukan konsistensi dan kesinambungan kebijakan. Berbeda dengan pembangunan fisik atau ekonomi yang hasilnya dapat segera terlihat, dampak dari pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan baru dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, setiap program pembangunan manusia perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, terencana, dan terus dipantau pelaksanaannya agar memberikan hasil yang optimal dan berdaya guna bagi masyarakat.

Pilar dan Ukuran Pembangunan Manusia

Berbicara mengenai keberhasilan pembangunan dewasa ini tidak lagi terbatas pada alat ukur ekonomi semata, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan per kapita, atau pertumbuhan ekonomi. Paradigma pembangunan telah bergeser dari sekadar peningkatan indikator ekonomi menuju perhatian yang lebih mendalam pada pembangunan manusia sebagai objek dan tujuan utama pembangunan itu sendiri.

Konsep pembangunan manusia berpedoman pada empat pilar utama, yaitu produktivitas (Productivity), pemerataan (Equity), kesinambungan (Sustainability), dan pemberdayaan (Empowerment). Keempat pilar ini mencerminkan bahwa pembangunan harus menciptakan masyarakat yang tidak hanya unggul dalam jumlah atau kuantitas, tetapi juga memiliki kualitas yang tinggi dalam hal kemampuan, kemandirian, serta daya saing. Dengan demikian, pembangunan manusia sejati menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan.

Mengutip Human Development Report (HDR) yang dipublikasikan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990, pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia (*enlarging the choice of people*). Di antara banyak pilihan tersebut, tiga hal dianggap paling fundamental, yaitu: (1) untuk berumur panjang dan sehat, (2) untuk berilmu pengetahuan, dan (3) untuk memiliki akses terhadap sumber daya yang memungkinkan manusia hidup secara layak dan bermartabat. Ketiga dimensi inilah yang menjadi fondasi utama dalam mengukur tingkat pembangunan manusia di berbagai wilayah.

Untuk melihat sejauh mana pencapaian pembangunan manusia dari berbagai perspektif, digunakan sejumlah indikator, antara lain PDRB, Rasio Gini, dan yang paling komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan IPM sebagai ukuran standar pembangunan manusia yang bersifat universal. IPM merupakan indeks komposit yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak.

Pembangunan manusia dengan demikian menekankan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan harus diarahkan pada upaya peningkatan pemberdayaan (empowerment), kemajuan (achievement), kapasitas (capability), serta kebebasan (freedom) manusia untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dengan pendekatan tersebut, IPM dapat dijadikan alat strategis untuk menilai, merencanakan, dan menganalisis keberhasilan pembangunan manusia dari waktu ke waktu.

Indeks Pembangunan Manusia dibentuk berdasarkan empat indikator utama, yaitu umur harapan hidup (UHH), angka harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama

sekolah (RLS), dan kemampuan daya beli. Indikator umur harapan hidup (UHH) menggambarkan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir, yang mencerminkan dimensi umur panjang dan sehat. Sementara itu, angka harapan lama sekolah serta rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan. Adapun kemampuan daya beli menggambarkan dimensi hidup layak melalui tingkat pendapatan dan konsumsi yang dapat dicapai oleh penduduk.

Luasnya cakupan pembangunan manusia menyebabkan peningkatan nilai IPM sering dijadikan sebagai manifestasi dari keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Dengan kata lain, peningkatan IPM mencerminkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memperluas pilihan-pilihan hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan pengembangan sumber daya manusianya. Upaya tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam perumusan kebijakan pembangunan hingga ke tingkat kecamatan, penting untuk memperhatikan tingkat pencapaian IPM setiap tahun agar arah kebijakan lebih terukur dan efektif.

Kajian terhadap pencapaian pembangunan manusia di tingkat kecamatan perlu dilakukan secara periodik dalam rentang waktu tertentu. Kajian semacam ini memberikan kesempatan untuk menilai efektivitas program-program yang telah dijalankan, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang masih ada. Melalui analisis tersebut, dapat diketahui sejauh mana program pembangunan berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas dasar penduduk di setiap kecamatan di Kota Depok, sehingga kebijakan yang diambil dapat semakin tepat sasaran dan berkelanjutan.

Untuk menilai sejauh mana pengaruh dan perencanaan pembangunan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai indikator-indikator yang mencerminkan kesejahteraan rakyat. Indikator tersebut berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan sosial, ekonomi, dan manusia secara keseluruhan. Secara umum, indikator kesejahteraan rakyat dapat dikelompokkan ke dalam empat bidang utama, yaitu:

- **Kependudukan**

Masalah kependudukan merupakan aspek fundamental dalam proses pembangunan karena berkaitan langsung dengan jumlah, komposisi, distribusi, pertumbuhan, dan beban ketergantungan penduduk. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain. Jika tidak dikelola dengan baik, persoalan kependudukan dapat menjadi beban yang cukup berat bagi proses pembangunan secara keseluruhan.

Kualitas penduduk yang rendah dapat memperlambat laju pembangunan ekonomi

dan sosial, serta menghambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi dua hal yang harus berjalan beriringan agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

- **Pendidikan**

Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan manusia. Pendidikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memperluas wawasan serta membentuk karakter dan pola pikir masyarakat yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Melalui pendidikan yang berkualitas, diharapkan masyarakat mampu meningkatkan partisipasinya dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kehidupan yang lebih layak.

Dalam konteks pembangunan manusia, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk individu yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Indikator yang umum digunakan untuk menilai tingkat partisipasi pendidikan antara lain: Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Dalam metodologi perhitungan IPM yang terbaru, dimensi pendidikan diwakili oleh dua indikator penting, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

- **Kesehatan**

Bidang kesehatan menjadi faktor penentu utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama pembangunan di bidang kesehatan adalah agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, terjangkau, dan merata. Dengan demikian, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan.

Indikator kesehatan yang sering digunakan antara lain adalah Umur Harapan Hidup (UHH), cakupan program keluarga berencana, serta kualitas kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan dapat diukur melalui berbagai aspek seperti ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, serta kondisi fisik perumahan (meliputi jenis lantai, dinding, dan atap rumah). Kesehatan yang baik mencerminkan dimensi umur panjang dan hidup produktif — salah satu komponen utama dalam IPM.

- **Ekonomi**

Dimensi ekonomi merupakan aspek penting yang menentukan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Indikator ekonomi umumnya mencakup kemampuan daya beli masyarakat serta pemerataan distribusi pendapatan antar kelompok sosial. Peningkatan daya beli menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses lebih baik terhadap barang dan jasa, yang pada akhirnya mencerminkan peningkatan standar hidup layak.

Dalam konteks pembangunan manusia, aspek ekonomi diukur melalui pendapatan per kapita yang disesuaikan, yang menggambarkan kemampuan riil individu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, dan pendidikan.

Keempat indikator kesejahteraan rakyat (Inkesra) tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga komponen utama dalam Inkesra, yaitu: Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi.

Dengan demikian, perubahan dalam salah satu dimensi kesejahteraan akan berdampak langsung terhadap nilai IPM secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya peningkatan IPM harus dilakukan secara terpadu melalui sinergi antara kebijakan di bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Sebagai langkah strategis dalam menilai perkembangan pembangunan manusia, Pemerintah Kota Depok memandang perlu untuk menyusun Kajian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok Tahun 2025. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian pembangunan manusia antar kecamatan serta menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkeadilan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan kegiatan penyusunan Analisis Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan estimasi data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode baru di 11 (sebelas) kecamatan di Kota Depok yang dapat menjelaskan kualitas penduduk di masing-masing kecamatan.
2. Menyediakan estimasi data IPM per kecamatan sehingga memungkinkan untuk membandingkan antar kecamatan dan memberikan gambaran tingkat kemajuan suatu kecamatan relatif terhadap kecamatan lainnya.

Dengan tersedianya publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok Tahun 2025 diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan pembangunan manusia antar kecamatan.

1.3 Target Kinerja Keluaran

Target Kinerja Keluaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kota Depok Tahun 2025 disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya;
- b. Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Depok yang dirinci berdasarkan Kecamatan Tahun 2025 disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya;
- c. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Depok berdasarkan Kecamatan Tahun 2025 disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya;
- d. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Depok menurut Kecamatan Tahun 2025 disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya;
- e. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di Kota Depok menurut Kecamatan Tahun 2025 disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (000 Rp).

BAB 2

METODOLOGI

2.1 Kerangka Pikir

Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk melalui tiga komponen utama yang merepresentasikan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam empat indikator, yaitu umur harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli. Dalam perhitungannya, IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari ketiga indeks utama: indeks kesehatan, indeks pendidikan (yang dibangun dari dua indikator pendidikan), dan indeks pengeluaran atau daya beli.

Pendekatan rata-rata geometrik memiliki makna penting: kinerja satu dimensi tidak dapat menutupi kelemahan dimensi lainnya. Artinya, keberhasilan pembangunan manusia hanya dapat tercapai apabila ketiga dimensi tersebut berkembang secara seimbang. Karena itu, setiap komponen IPM terlebih dahulu distandarisasi menggunakan nilai minimum dan maksimum yang telah ditetapkan sebelum dilakukan penghitungan komposit IPM secara keseluruhan.

Kajian penentuan IPM di 11 kecamatan Kota Depok dilakukan melalui kombinasi kajian survei, pemodelan statistik, dan analisis data baik primer maupun sekunder. Saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) baru merilis nilai IPM di tingkat kota, karena ketersediaan data survei di tingkat kecamatan masih terbatas. Dengan adanya 11 kecamatan dan 63 kelurahan, pengumpulan data primer secara penuh akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar, baik dari sisi biaya maupun tenaga.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, digunakan pendekatan pendugaan area kecil (*Small Area Estimation/SAE*). Metode ini memungkinkan estimasi parameter pada subpopulasi dengan ukuran sampel yang kecil, dengan memanfaatkan informasi tambahan dari area lain atau data sekunder yang relevan. Menurut Rao dan Molina (2015), SAE merupakan teknik statistik yang efektif untuk memperoleh estimasi yang lebih akurat dan stabil pada area yang memiliki keterbatasan data, seperti tingkat kecamatan atau kelurahan.

Dalam pengembangannya, pendugaan tidak hanya dilakukan secara tidak langsung melalui model SAE, tetapi juga dengan mempertimbangkan **tren data runtun waktu** (*time series*) untuk memberikan **bobot pembaruan** terhadap hasil estimasi. Pendekatan ini mengombinasikan tiga komponen utama, yaitu **pendugaan langsung**, **pendugaan tidak langsung (SAE)**, dan **analisis tren runtun waktu**, sehingga menghasilkan estimasi gabungan yang lebih seimbang antara kondisi aktual dan pola perkembangan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, hasil pendugaan menjadi lebih representatif, stabil, dan adaptif terhadap dinamika perubahan antarperiode, serta dapat digunakan sebagai dasar yang lebih kuat dalam pemantauan dan perencanaan kebijakan pembangunan manusia di tingkat wilayah kecil.

2.2 Metodologi Survey

2.2.1 Penyusunan Instrumen Survei

Kegiatan survei pada kajian ini dilakukan melalui wawancara terhadap rumah tangga dan instansi terkait. Survei ini bertujuan untuk memperoleh informasi primer yang mendukung pengukuran atribut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat kecamatan.

Tabel 2.1 berikut memperlihatkan hubungan antara jenis data yang dibutuhkan untuk pengukuran komponen IPM dengan sumber serta pemilik data yang relevan. Informasi ini menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan survei agar pengumpulan data dapat dilakukan secara sistematis dan terarah.

Dengan demikian, dalam pelaksanaannya diperlukan instrumen pengumpulan data yang tepat agar seluruh informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara akurat dan efisien. Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan metode statistik untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan kajian.

Untuk mencapai hasil yang komprehensif, disusun jenis kuesioner yang digunakan sesuai dengan kelompok responden, yaitu Kuesioner Rumah Tangga. Kuesioner ini digunakan untuk menggali informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat;

Penyusunan kuesioner dilakukan secara cermat agar proses entri, pengolahan, dan analisis data dapat berjalan lebih mudah, akurat, serta menghasilkan temuan yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan pembangunan di Kota Depok.

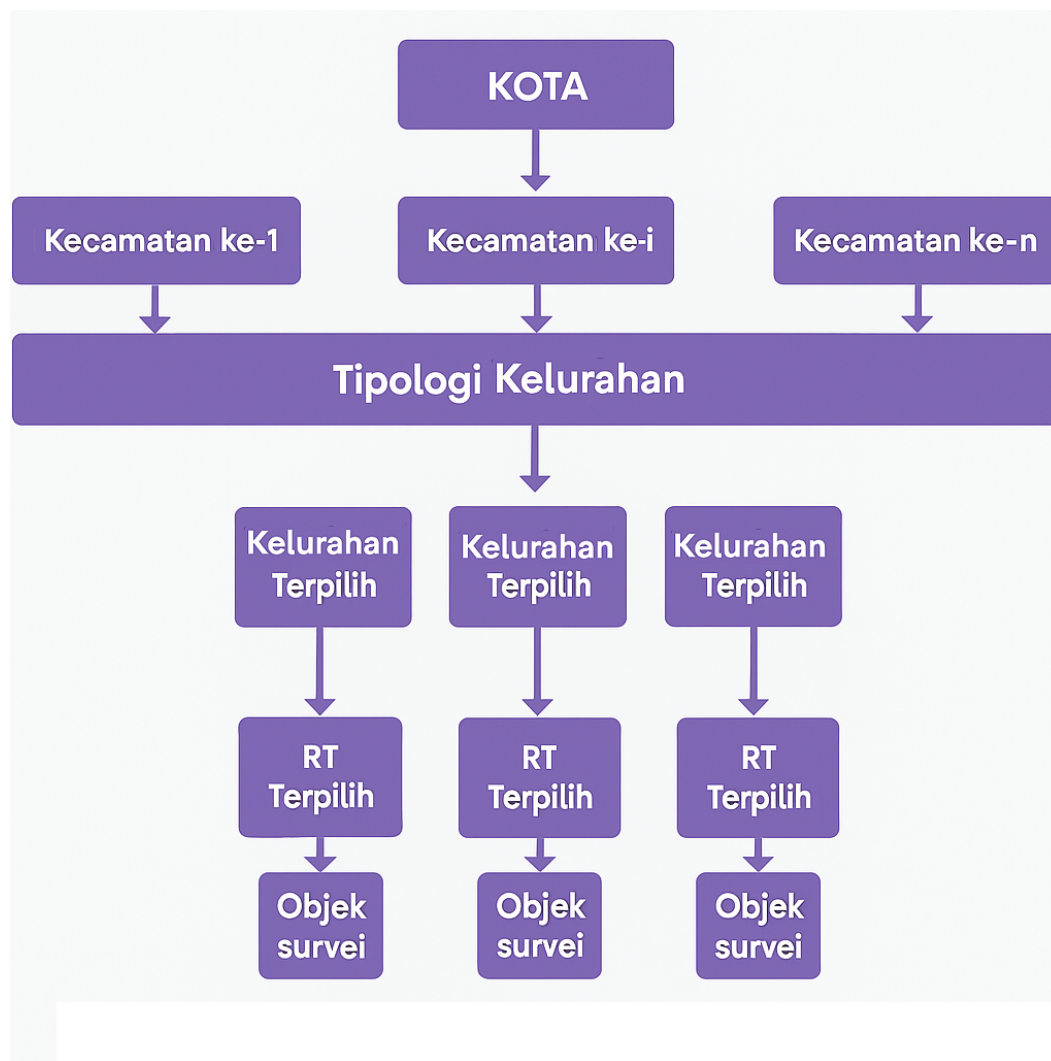
Tabel 2.1: Data Sekunder dan Sumber Data

No.	Komponen IPM / Atribut	Sumber Data	Pemilik Data
1	Kesehatan: UHH	Sensus Penduduk (SP)	Badan Pusat Statistik (BPS)
2	Pengetahuan: RLS & HLS	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Badan Pusat Statistik (BPS)
3	Pengetahuan: HLS	Daftar Pesantren se-Kota Depok	Kementerian Agama
4	Pengeluaran	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Badan Pusat Statistik (BPS)
5	Peubah Penjelas (Auxiliary Variables)	Kota Depok dalam Angka 2024	Badan Pusat Statistik (BPS)
6	Peubah Penjelas (Auxiliary Variables)	Potensi Desa (Podes)	Badan Pusat Statistik (BPS)

2.2.2 Pemilihan Lokasi dan Objek Survei

a. Pemilihan Lokasi Survei

Survei dilakukan di seluruh kecamatan di wilayah Kota Depok. Namun demikian, survei tidak dilakukan di seluruh kelurahan dengan pertimbangan bahwa banyak kelurahan memiliki karakteristik yang relatif sama. Untuk kelurahan yang memiliki kemiripan karakteristik, pemilihan dilakukan secara representatif dengan menunjuk kelurahan lain yang sejenis sebagai perwakilannya. Pemilihan lokasi survei dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan setiap kecamatan sehingga hasil survei dapat digunakan untuk melakukan pendugaan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** pada tingkat kota dengan tingkat akurasi yang memadai.



Gambar 2.1: Desain Penentuan Objek Survei dan Lokasinya

Selain itu, lokasi survei juga ditentukan dengan mengacu pada keterwakilan level kecamatan serta memperhatikan berbagai kendala teknis, terutama keterbatasan biaya dan sumber daya yang tersedia. Faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan kegiatan survei ini. Metode penentuan ukuran sampel disusun sedemikian rupa agar pelaksanaan survei dapat berjalan secara efisien dan efektif, berorientasi pada keterbatasan biaya dan waktu namun tetap mengikuti kaidah-kaidah statistik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Desain penentuan lokasi dan objek survei secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 2.1. Dengan mempertimbangkan keragaman kondisi kelurahan, sebelum proses pemilihan kelurahan dilakukan terlebih dahulu tahap *pengklasteran (clustering)* kelurahan berdasarkan indikator-indikator penting yang memiliki keterkaitan erat dengan besaran Indeks Pembangunan Manusia.

Pengklasteran dilakukan dengan tujuan agar kelurahan yang memiliki karakteristik atau sifat yang mirip dapat dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama. Langkah

ini penting untuk menjamin keterwakilan karakteristik wilayah dalam proses pendugaan. Karena pendugaan dilakukan pada level kecamatan, maka setiap klaster yang terdapat di dalam satu kecamatan harus diwakili oleh paling sedikit satu kelurahan yang mencerminkan karakteristik umum klaster tersebut.

Jumlah kelurahan di setiap kecamatan di Kota Depok disajikan pada Tabel 2.2. Sebaran ini memberikan gambaran tentang proporsi wilayah administratif yang menjadi dasar dalam perancangan pengambilan sampel survei.

Tabel 2.2: Sebaran Banyak Kelurahan Setiap Kecamatan di Kota Depok

No.	Kecamatan	Banyak Kelurahan
1	Pancoran Mas	6
2	Cimanggis	6
3	Sawangan	7
4	Limo	4
5	Sukmajaya	6
6	Beji	6
7	Cipayung	5
8	Cilodong	5
9	Cinere	4
10	Tapos	7
11	Bojongsari	7
Total		63

Untuk penentuan lokasi survei pada tingkat kecamatan, ditetapkan ketentuan bahwa ibu kota kecamatan selalu menjadi lokasi survei terpilih. Pertimbangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa di wilayah ibu kota kecamatan biasanya terdapat objek survei yang lebih beragam serta jumlah objek yang cukup besar, sehingga mampu merepresentasikan perilaku masyarakat dan kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut secara lebih komprehensif.

Sementara itu, kelurahan lain di luar ibu kota kecamatan dipilih secara acak dari klaster-klaster kelurahan yang tersisa. Pemilihan dilakukan menggunakan metode *random proportional to size (RPS)*, yaitu teknik pengambilan sampel acak di mana probabilitas terpilihnya suatu kelurahan sebanding dengan ukuran atau proporsi populasi yang dimilikinya. Dengan demikian, representasi data yang dihasilkan tetap proporsional terhadap kondisi nyata di lapangan.

Selanjutnya, karena jumlah kelurahan pada setiap kecamatan relatif seimbang, maka penentuan sampel dilakukan dengan mengambil **dua kelurahan** pada setiap kecamatan. Perbedaan antar kecamatan hanya terletak pada jumlah **responden rumah tangga** yang diwawancarai, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.3. Dengan pendekatan ini, total kelurahan yang menjadi lokasi survei berjumlah **22 kelurahan** yang tersebar merata di seluruh wilayah Kota Depok.

Tabel 2.3: Sebaran Responden yang Ditetapkan untuk Setiap Kelurahan

No	Kecamatan	Kelurahan	Banyaknya Responden
1	Sawangan	Pengasinan	20
2	Sawangan	Sawangan	20
3	Bojongsari	Duren Seribu	20
4	Bojongsari	Bojongsari	20
5	Pancoran Mas	Mampang	20
6	Pancoran Mas	Depok	21
7	Cipayung	Ratu Jaya	21
8	Cipayung	Cipayung	20
9	Sukmajaya	Sukmajaya	21
10	Sukmajaya	Abadijaya	21
11	Cilodong	Kalimulya	20
12	Cilodong	Cilodong	20
13	Cimanggis	Tugu	21
14	Cimanggis	Pasir Gunung Selatan	21
15	Tapos	Cimpaeun	20
16	Tapos	Jatijajar	21
17	Beji	Beji	21
18	Beji	Beji Timur	20
19	Limo	Grogol	20
20	Limo	Limo	21
21	Cinere	Cinere	21
22	Cinere	Pangkalanjati	20

b. Pemilihan Objek Survei

Agar diperoleh rancangan survei yang baik dan representatif, maka dalam kegiatan ini digunakan data dasar (*sampling frame*) sebagai acuan utama. Data dasar tersebut berfungsi untuk menentukan jumlah sampel yang mewakili populasi dengan tingkat *error* yang dianggap wajar serta dapat diterima. Bentuk data dasar ini berupa daftar objek populasi yang akan disurvei. Sumber data populasi berasal dari lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah, yaitu **Badan Pusat Statistik (BPS)**, misalnya melalui *Data Potensi Desa (Podes)*.

Berdasarkan cara pengambilannya, objek-objek survei dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

Kelompok 1: merupakan objek survei yang pengambilan sampelnya dilakukan pada *kelurahan/desa terpilih* di setiap kecamatan, di mana kerangka sampelnya tersedia di tingkat kelurahan/desa. Objek survei yang termasuk dalam kelompok ini adalah **rumah tangga**.

Kelompok 2: merupakan objek survei yang pengambilan sampelnya dilakukan secara *purposive* (disengaja) sesuai dengan ketersediaan data yang diperlukan dalam penelitian. Kelompok ini mencakup **instansi atau lembaga terkait**.

2.2.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui **wawancara langsung** (*face-to-face interview*) dengan menggunakan instrumen **kuesioner terstruktur**. Instrumen ini disusun secara khusus untuk setiap jenis objek survei, baik rumah tangga maupun instansi terkait, agar seluruh variabel yang dibutuhkan dalam pengukuran **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** dapat terukur secara tepat dan konsisten.

a. Metode Sampling

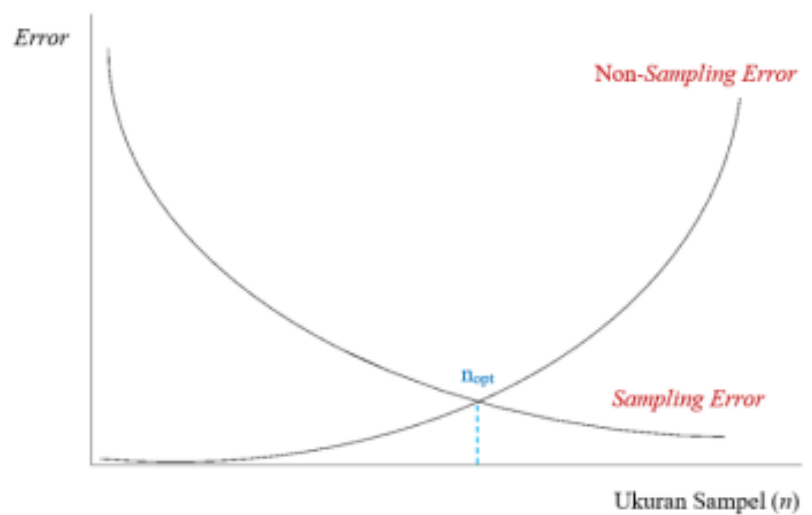
Survei ini dirancang untuk memperoleh pendugaan nilai IPM Kota Depok dengan tingkat akurasi yang tinggi dan terukur. Oleh karena itu, metode sampling yang digunakan adalah **probability sampling**, yaitu metode pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap elemen populasi untuk terpilih sebagai sampel.

Dalam kegiatan survei, kesalahan (*error*) dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu:

- a. ***Sampling error***, yaitu kesalahan yang muncul karena hanya sebagian anggota populasi yang diambil sebagai sampel. Semakin besar ukuran sampel, maka *sampling error* cenderung semakin kecil.
- b. ***Non-sampling error***, yaitu kesalahan yang timbul bukan akibat proses pengambilan sampel, melainkan karena faktor lain seperti kesalahan alat ukur, kesalahan wawancara, *non-response*, atau kesalahan entri data.

Untuk menghasilkan pendugaan yang baik, diperlukan metode sampling yang efisien sehingga kesalahan total dapat diminimalkan. Meskipun *sampling error* dapat ditekan dengan menambah jumlah sampel, peningkatan sampel yang terlalu besar justru berpotensi menambah *non-sampling error*. Dengan demikian, diperlukan suatu pendekatan yang menyeimbangkan antara kedua sumber kesalahan tersebut, sehingga diperoleh **ukuran sampel minimum yang optimal**.

Hubungan antara ukuran sampel dan tingkat kesalahan pendugaan disajikan pada Gambar 2.2.

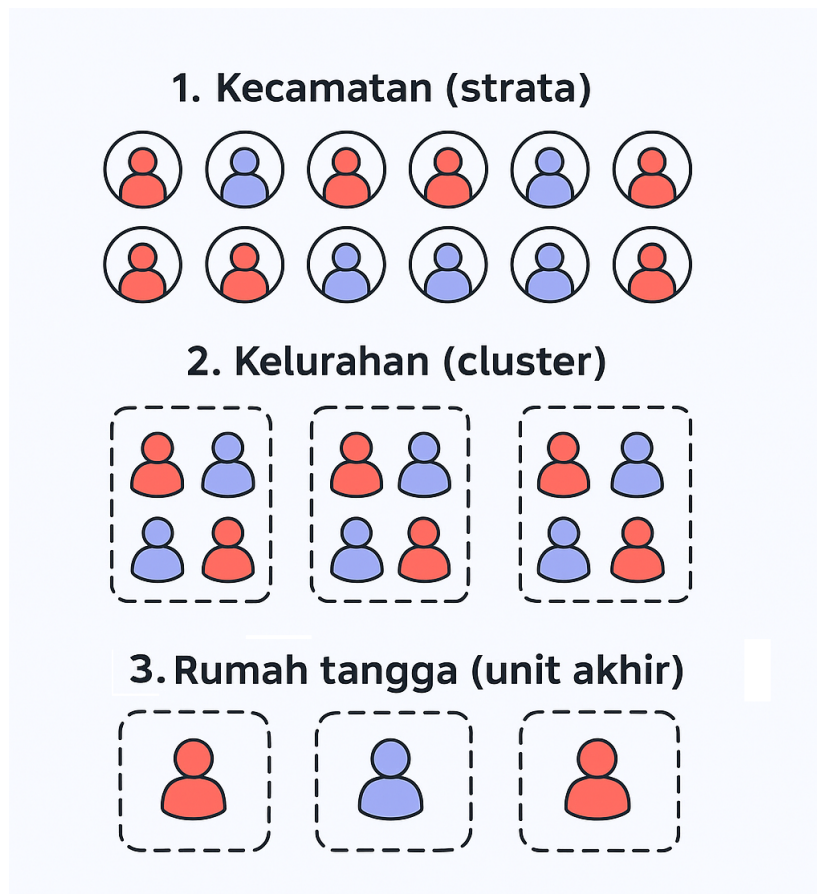


Gambar 2.2: Hubungan antara ukuran contoh (sampel) dengan kesalahan pendugaan (error).

Rancangan Penarikan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam survei ini adalah **teknik *multistage random sampling***, yaitu pengambilan sampel bertingkat yang digunakan ketika populasi sangat besar dan tersebar secara geografis, sehingga tidak efisien apabila dilakukan penarikan sampel secara langsung dari keseluruhan populasi. Dalam pendekatan ini, pengambilan sampel dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama memilih unit-unit besar seperti provinsi atau kabupaten, kemudian pada tahap berikutnya dipilih unit yang lebih kecil seperti desa atau rumah tangga. Teknik ini banyak digunakan oleh lembaga statistik nasional, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), dalam pelaksanaan survei besar seperti Susenas dan Sakernas karena dapat menyeimbangkan efisiensi biaya dan ketepatan estimasi.

Skema pelaksanaan metode tersebut pada kegiatan Penyusunan Pembangunan Manusia Kecamatan di Kota Depok ditunjukkan pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3: Skema *multistage random sampling*.

Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan survei rumah tangga dilaksanakan pada bulan Juni – Juli 2025.

2.3 Metode Penjaminan Mutu Data

Seperti dijelaskan sebelumnya, kesalahan (*error*) dalam survei tidak hanya bersumber dari *sampling error*, tetapi juga dari *non-sampling error*. Pada survei berskala besar, *non-sampling error* dapat menjadi sangat signifikan jika tidak dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan sistem **manajemen penjaminan mutu data** yang terencana dan berlapis untuk menjaga kualitas hasil survei.

Kegiatan **Quality Assurance (QA)** dan **Quality Control (QC)** dilakukan sebagai bagian dari proses pengawasan dan evaluasi atas mutu data yang diperoleh dari objek survei. Penjaminan mutu dilakukan secara bertahap mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga proses entri data agar seluruh hasil survei akurat, valid, dan konsisten.

2.3.1 Persiapan Survei

Sebelum pelaksanaan survei, dilakukan kegiatan **pelatihan (coaching)** bagi seluruh surveyor. Tujuan utama pelatihan ini adalah untuk memastikan setiap surveyor memahami dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* survei.

Materi pelatihan meliputi:

- pemahaman umum tentang latar belakang dan tujuan survei,
- pentingnya menjaga kualitas data,
- manfaat data berkualitas bagi perumusan kebijakan,
- etika wawancara dan interaksi dengan responden,
- teknik memperoleh jawaban akurat dari responden,
- serta pemahaman terhadap kelengkapan dokumen hasil survei.

Diharapkan dari hasil pelatihan ini diperoleh surveyor yang berintegritas, profesional, dan mampu menghindari perilaku curang (*cheating*). Untuk menjamin pelaksanaan survei berjalan sesuai prosedur, setiap surveyor dibekali dengan:

- *SOP/Panduan Pelaksanaan Survei*,
- *Panduan Wawancara*,
- *Panduan Pengisian Kuesioner*,
- *Panduan Listing*, dan
- *Panduan Entri Data*.

2.3.2 Pelaksanaan Survei

Tahap pelaksanaan survei merupakan **tahapan paling krusial** dalam keseluruhan kegiatan karena menjadi penentu utama kualitas data yang dihasilkan. Manajemen pelaksanaan survei dilakukan secara berjenjang untuk memastikan setiap langkah berjalan sesuai standar.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden di lokasi survei menggunakan instrumen kuesioner terstruktur. Kuesioner dilengkapi dengan *filter questions* (pertanyaan penyaring) untuk membantu surveyor mendeteksi adanya ketidakkonsistenan dalam jawaban responden.

Untuk menjamin mutu hasil pengumpulan data, terdapat **Koordinator Surveyor** yang bertugas:

- memastikan setiap surveyor menjalankan tugas sesuai SOP,
- melakukan verifikasi kelengkapan dan keakuratan data,
- mengembalikan kuesioner yang tidak lengkap atau tidak valid untuk diperbaiki atau dilakukan survei ulang.

Kuesioner yang telah diverifikasi oleh Koordinator Surveyor kemudian diserahkan

kepada **Supervisor tingkat kelurahan**. Supervisor bertanggung jawab melakukan verifikasi lanjutan terhadap data yang dikumpulkan. Apabila masih ditemukan ketidaktepatan, kuesioner dikembalikan untuk diperbaiki. Hanya data yang telah dinyatakan valid oleh Supervisor yang dapat diteruskan ke tahap entri data.

2.3.3 Entri Data

Tahap entri data dilakukan di setiap kelurahan atau desa wilayah survei menggunakan **Google Form** sebagai instrumen digital utama. Penggunaan Google Form memberikan berbagai keuntungan, antara lain:

- kemudahan penggunaan dan fleksibilitas dalam menyesuaikan pertanyaan dan skala,
- integrasi langsung dengan Google Sheets untuk kemudahan pengolahan dan analisis data,
- kemudahan berbagi dan kolaborasi dalam tim,
- serta pengaturan keamanan untuk melindungi privasi responden.

Selain itu, aksesibilitas Google Form melalui berbagai perangkat memudahkan surveyor dan responden untuk melakukan entri data kapan pun dan di mana pun. Dengan demikian, sistem ini merupakan solusi yang efisien dan andal untuk mendukung kegiatan survei berskala luas serta memastikan data yang dikumpulkan akurat dan siap untuk dianalisis.

2.4 Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan *data cleaning*. Proses ini dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan yang mungkin masih terjadi dalam proses entri data dan belum tersaring oleh mekanisme pemeriksaan otomatis yang diterapkan dalam program. Setelah data dinyatakan valid, tahap berikutnya adalah analisis data.

Analisis data yang dilakukan mencakup *statistika deskriptif*, pendugaan langsung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat kota, serta pendugaan tidak langsung IPM tingkat kecamatan. Seluruh proses analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak **R: A Language and Environment for Statistical Computing**.

2.4.1 Statistika Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi masyarakat responden secara umum berdasarkan faktor-faktor yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan grafik, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi mengenai pola dan distribusi kondisi masyarakat.

2.4.2 Pendugaan Langsung Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Kota

Pendugaan langsung Indeks Pembangunan Manusia tingkat kota dilakukan dengan memanfaatkan data faktor-faktor yang dikumpulkan dari survei rumah tangga sampel. Pendugaan ini dilakukan secara langsung berdasarkan data survei tanpa menggunakan model tambahan. Nilai IPM kota dihitung dari hasil penggabungan indikator utama, yaitu:

- a. Umur harapan hidup saat lahir (UHH),
- b. Harapan lama sekolah (HLS),
- c. Rata-rata lama sekolah (RLS), dan
- d. Pengeluaran per kapita disesuaikan.

Nilai-nilai tersebut kemudian dinormalisasi dan digabungkan untuk memperoleh indeks komposit sesuai dengan metodologi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

2.4.3 Pendugaan Tidak Langsung IPM Tingkat Kecamatan Melalui Metode *Small Area Estimation* (SAE)

Untuk melakukan pendugaan tidak langsung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat kecamatan, digunakan data faktor-faktor yang diteliti dari objek survei rumah tangga yang telah diambil sebagai sampel, serta data sekunder dari Potensi Desa (*Podes*) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan ialah *Small Area Estimation* (SAE), yang pada dasarnya memanfaatkan informasi dari data survei serta data lain di luar survei yang dapat menunjang hasil pendugaan.

Pendugaan IPM di tingkat kecamatan tidak dapat dilakukan menggunakan metode pendugaan langsung (*direct estimation*) dengan data Susenas, karena jumlah sampel Susenas dirancang agar akurat pada tingkat kabupaten/kota, bukan kecamatan. Oleh sebab itu, digunakan metode pendugaan tidak langsung (*indirect estimation*), yang mengombinasikan data survei rumah tangga dengan data sekunder dari Podes.

Pendekatan pemodelan yang digunakan adalah metode SAE, yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan presisi pendugaan melalui pemanfaatan informasi tambahan dari area lain atau dari variabel yang berkorelasi. Ukuran sampel yang kecil pada sub-area menyebabkan statistik penduga memiliki ragam besar, atau bahkan tidak dapat dihitung pada area yang tidak terpilih menjadi sampel. Metode SAE dikembangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan *borrowing strength* dari area lain yang memiliki karakteristik serupa (Rao *et al.* 2014; Chambers *et al.* 2014; Fabrizi *et al.* 2014; Prendergast dan Sheather 2013; Alfons *et al.* 2013; Salvati *et al.*

2012; Zhang dan Hagesaether 2011; Haslett dan Jones 2010; Sinha dan Rao 2009; Lahiri 2008; Russo *et al.* 2005; Rao 2003).

Informasi tambahan dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi pendugaan. Dalam konteks SAE, informasi tersebut dapat berupa:

- nilai parameter dari area kecil lain yang serupa,
- nilai dari waktu sebelumnya, atau
- nilai dari peubah lain yang berkorelasi dengan peubah yang diamati.

Pendugaan berdasarkan informasi tambahan ini disebut *model-based estimation*, yang secara statistik memiliki sifat penguatan (*borrowing strength*) dari hubungan antara peubah respons dan peubah penjelas (Salvati *et al.* 2012; Tanton *et al.* 2011; Tzadivis *et al.* 2010).

Formulasi Model SAE

Small Area Estimation (SAE) merupakan suatu pendekatan statistik yang digunakan untuk melakukan pendugaan parameter pada wilayah atau domain dengan ukuran sampel yang kecil, sehingga metode pendugaan langsung (*direct estimation*) tidak memberikan hasil yang andal. Pendekatan ini banyak diterapkan dalam survei sosial dan ekonomi untuk menghasilkan estimasi yang lebih akurat pada level wilayah kecil, seperti kecamatan atau desa, dengan cara menggabungkan data survei (sampel) dan data tambahan (*auxiliary data*) dari sumber lain seperti registrasi administratif atau sensus (Rao, 2003; Molina & Rao, 2010).

Secara umum, metode SAE didasarkan pada model *model-based* yang memanfaatkan hubungan antara variabel respon dan variabel penjelas untuk meningkatkan efisiensi pendugaan. Model dasar yang digunakan adalah *Fay–Herriot model* untuk data area-level, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\hat{Y}_i = X_i^\top \beta + v_i + e_i, \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

di mana \hat{Y}_i adalah penduga langsung untuk area ke- i , X_i adalah vektor variabel penjelas, β adalah parameter regresi, v_i adalah efek acak area yang berdistribusi $v_i \sim N(0, \sigma_v^2)$, dan e_i adalah galat sampling dengan $e_i \sim N(0, \sigma_{e_i}^2)$. Pendugaan tak langsung (*indirect estimation*) dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan dari area lain yang memiliki karakteristik serupa melalui pendekatan *empirical best linear unbiased predictor* (EBLUP) atau metode Bayes (Rao & Molina, 2015).

Kelebihan utama SAE adalah kemampuannya untuk meningkatkan presisi estimasi pada domain kecil dengan “meminjam kekuatan” (*borrowing strength*) dari hubungan antar area maupun antar variabel. Dalam konteks pengukuran pembangunan manusia, SAE memungkinkan pendugaan indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

di tingkat kecamatan secara lebih akurat, meskipun data sampel yang tersedia terbatas. Hal ini menjadi penting dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti di tingkat daerah (Fay & Herriot, 1979; Rao, 2003; Pratesi, 2016).

2.4.4 Pendugaan Tidak Langsung IPM Tingkat Kecamatan melalui Analisis Tren Runtun Waktu menggunakan *Exponential Smoothing*

Untuk meningkatkan ketepatan estimasi, pendekatan pendugaan tidak langsung dapat dikombinasikan dengan analisis tren data deret waktu. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah *Exponential Smoothing*, yang memberikan pembobotan lebih besar pada pengamatan terbaru dan memungkinkan penangkapan pola perubahan secara dinamis dari waktu ke waktu.

Model *Exponential Smoothing* dasar dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\hat{Y}_{t+1} = \alpha Y_t + (1 - \alpha) \hat{Y}_t, \quad (2.1)$$

dengan α merupakan parameter pelicin ($0 < \alpha \leq 1$) yang mengatur besarnya bobot terhadap nilai observasi terakhir Y_t dan nilai ramalan sebelumnya \hat{Y}_t . Nilai α yang lebih besar menekankan pengaruh observasi terkini, sedangkan nilai yang lebih kecil menekankan tren historis yang lebih panjang.

Dalam penerapan pada pendugaan IPM tingkat kecamatan, hasil pendugaan langsung (*direct estimate*) dan pendugaan tidak langsung melalui model Small Area Estimation (SAE) digabungkan dengan hasil estimasi tren dari *Exponential Smoothing*. Penggabungan tersebut dilakukan dalam bentuk pembobotan berdasarkan reliabilitas masing-masing penduga, sehingga diperoleh penduga gabungan yang lebih stabil dan adaptif terhadap perubahan waktu.

Melalui pendekatan ini, diperoleh pendugaan IPM tingkat kecamatan yang tidak hanya mempertimbangkan informasi lintas unit wilayah (melalui SAE), tetapi juga memperhitungkan dinamika waktu (melalui analisis tren deret waktu). Dengan demikian, hasil estimasi diharapkan lebih representatif dan responsif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi antarperiode.

2.5 Kebutuhan Data untuk Penghitungan IPM Level Kecamatan

Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memerlukan berbagai sumber data relevan yang secara umum dirumuskan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4: Sumber Data dalam Pengukuran IPM

No.	Komponen IPM / Atribut	Sumber Data
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Proyeksi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan data primer.
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Pendugaan Small Area Estimation (SAE) berdasarkan Susenas dan data primer serta variabel tambahan (<i>auxiliary variable</i>).
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	SAE berdasarkan Susenas dan data primer serta variabel tambahan (<i>auxiliary variable</i>) dengan faktor koreksi pesantren.
4	Pengeluaran per Kapita	SAE berdasarkan Susenas dan data primer serta variabel tambahan (<i>auxiliary variable</i>) dengan pendekatan distribusi lognormal.

IPM mengukur pencapaian rata-rata suatu wilayah berdasarkan tiga aspek utama yaitu:

- **Kesehatan:** diukur melalui indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir.
- **Pengetahuan:** diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).
- **Standar Hidup:** diukur melalui indikator Pengeluaran per Kapita.

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH dihitung dari hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP) tahun 2020.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi pada umur tersebut proses pendidikan formal umumnya telah selesai.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas, sesuai kebijakan pemerintah mengenai program wajib belajar. Untuk mengakomodasi penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan data siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam.

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, kemudian dikonversi menjadi nilai konstan (riil) dengan tahun dasar 2012 = 100. Perhitungan paritas daya beli menggunakan 96 komoditas, terdiri dari 66 komoditas makanan dan sisanya komoditas nonmakanan. Metode yang digunakan untuk menghitung paritas daya beli adalah *Metode Rao*.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperhitungkan berdasarkan sejumlah

persamaan yang telah disesuaikan dengan perubahan metodologi. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan relevansi dan ketepatan dalam mengukur pembangunan manusia di berbagai wilayah.

Perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Beberapa indikator lama sudah tidak tepat digunakan dalam penghitungan IPM. Misalnya, **angka melek huruf** tidak lagi relevan dalam menggambarkan kualitas pendidikan secara utuh karena nilainya yang sudah tinggi di sebagian besar daerah sehingga tidak mampu membedakan tingkat pendidikan antarwilayah secara akurat.
- b. **Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita** dinilai kurang representatif untuk menggambarkan pendapatan masyarakat suatu wilayah, karena PDB lebih mencerminkan nilai produksi domestik.
- c. **Penggunaan rata-rata aritmatik** dalam metode lama dapat menyebabkan capaian rendah pada satu dimensi tertutupi oleh capaian tinggi pada dimensi lain, sehingga hasil IPM tidak proporsional.

Perubahan yang diterapkan dalam metodologi IPM terbaru meliputi:

- a. **Angka Melek Huruf** pada metode lama digantikan oleh **Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)**, yang lebih mampu menggambarkan peluang partisipasi pendidikan di masa depan.
- b. **Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita** diganti menjadi **Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita**, karena lebih merepresentasikan pendapatan masyarakat.
- c. **Metode agregasi** diubah dari *rata-rata aritmatik* menjadi *rata-rata geometrik* untuk menyeimbangkan pengaruh tiap dimensi.

Keunggulan metode baru IPM adalah penggunaan indikator yang lebih tepat dan bersifat diskriminatif, sehingga mampu menggambarkan kondisi pembangunan manusia secara lebih komprehensif:

- a. Dengan memasukkan **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** dan **Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)**, diperoleh gambaran yang lebih utuh dan relevan mengenai kondisi pendidikan dan perubahannya dari waktu ke waktu.
- b. **PNB per kapita** menggantikan PDB per kapita karena lebih mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat di suatu wilayah.

Selain itu, penggunaan **rata-rata geometrik** dalam penyusunan IPM memiliki makna penting bahwa capaian satu dimensi tidak dapat menutupi capaian rendah pada dimensi lain. Dengan demikian, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang optimal, ketiga dimensi utama — *kesehatan*, *pendidikan*, dan *standar hidup* — harus memperoleh perhatian yang seimbang karena memiliki bobot yang sama pentingnya.

Menghitung Indeks Komponen

Setiap komponen pembentuk IPM terlebih dahulu distandardisasi dengan menggunakan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan dalam perhitungan. Standarisasi ini bertujuan agar ketiga dimensi (kesehatan, pendidikan, dan standar hidup) berada dalam skala yang sama, yaitu antara 0 dan 1.

Indeks untuk masing-masing dimensi dihitung dengan rumus umum:

$$\text{Indeks Dimensi} = \frac{\text{Nilai Aktual} - \text{Nilai Minimum}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}}$$

Dengan demikian:

$$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{\text{UHH} - 20}{85 - 20},$$

$$\text{Indeks Pendidikan} = \sqrt{\text{Indeks RLS} \times \text{Indeks HLS}},$$

$$\text{Indeks Standar Hidup} = \frac{\ln(\text{Pengeluaran per Kapita}) - \ln(100)}{\ln(75,000) - \ln(100)}.$$

Setelah ketiga indeks komponen diperoleh, IPM dihitung sebagai **rata-rata geometrik** dari ketiga indeks tersebut, yaitu:

$$\text{IPM} = (\text{Indeks Kesehatan} \times \text{Indeks Pendidikan} \times \text{Indeks Standar Hidup})^{1/3}$$

Hasil akhir IPM dinyatakan dalam skala 0 sampai 100 dengan mengalikan hasil perhitungan di atas dengan faktor 100:

$$\text{IPM} = 100 \times (\text{Indeks Kesehatan} \times \text{Indeks Pendidikan} \times \text{Indeks Standar Hidup})^{1/3}$$

2.5.1 Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia

Implementasi metode baru penghitungan IPM di Indonesia mengikuti prinsip dan panduan UNDP dengan beberapa penyesuaian terhadap ketersediaan data nasional. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut:

- Umur Harapan Hidup (UHH)** saat lahir diperoleh dari hasil *Sensus Penduduk* tahun 2010 dan 2020 serta *Proyeksi Penduduk* yang diterbitkan oleh BPS.
- Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)** dan **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** bersumber dari *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)*.
- Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita** tidak tersedia pada level provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga digunakan proksi berupa **pengeluaran per kapita disesuaikan** berdasarkan data *SUSENAS*.

- d. Penentuan **nilai maksimum dan minimum** setiap indikator menggunakan *standar UNDP* untuk menjaga keterbandingan secara global, kecuali untuk dimensi **standar hidup layak** yang menggunakan ukuran dalam satuan rupiah.

Dengan pendekatan tersebut, perhitungan IPM di Indonesia tetap konsisten dengan metodologi UNDP namun relevan dengan kondisi dan ketersediaan data nasional.

BAB 3

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KECAMATAN DI KOTA DEPOK

3.1 Urgensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran komprehensif yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sejak tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam *Human Development Report* (HDR) sebagai alat untuk menilai pencapaian rata-rata suatu negara atau wilayah dalam tiga dimensi mendasar pembangunan manusia: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). IPM menjelaskan sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam bentuk layanan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang memadai. Dengan demikian, IPM tidak hanya menjadi indikator statistik, tetapi juga representasi dari kemampuan manusia dalam memperluas pilihan hidupnya (*enlarging the choices of people*) sebagaimana dikemukakan oleh UNDP (1990).

Urgensi IPM dalam konteks pembangunan nasional terletak pada fungsinya sebagai indikator utama untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia secara menyeluruh. IPM mampu menggambarkan kualitas hidup masyarakat melalui tiga parameter inti:

1. derajat kesehatan yang diukur dengan umur harapan hidup
2. pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta
3. pendapatan yang diukur melalui daya beli masyarakat.

Dengan ketiga komponen tersebut, IPM menjadi indikator penting untuk memantau sejauh mana hasil pembangunan telah dinikmati secara merata oleh penduduk. Di Indonesia, IPM memiliki posisi strategis karena digunakan tidak hanya sebagai ukuran kinerja pembangunan daerah, tetapi juga sebagai salah satu dasar penentuan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat kepada daerah.

Lebih jauh, IPM berperan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang

berorientasi pada manusia (*people-centered development*). Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan sekadar sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Dengan memahami capaian dan kesenjangan nilai IPM antarwilayah, pemerintah dapat menyusun strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran, seperti peningkatan akses pendidikan di daerah tertinggal atau perbaikan layanan kesehatan dasar di wilayah terpencil. IPM juga berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang dijalankan, terutama dalam mendorong pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Pentingnya dimensi “manusia” dalam pembangunan menjadikan peningkatan IPM sebagai prioritas nasional. Sebagaimana dinyatakan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, fokus kebijakan tidak hanya diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas manusia yang sehat, cerdas, berdaya, dan produktif. Dengan demikian, pengukuran dan peningkatan IPM tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan sosial.

3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Di tingkat Kota Depok, IPM memiliki peran strategis dalam mengevaluasi capaian pembangunan, merancang kebijakan yang berbasis bukti, serta memastikan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah kota.

Berikut ini disajikan berbagai kegunaan IPM sebagai indikator pembangunan di tingkat Kota Depok:

1. Mengukur Kualitas Hidup Penduduk Kota Depok

IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Melalui IPM, Pemerintah Kota Depok dapat menilai sejauh mana penduduk menikmati hasil pembangunan secara merata serta mengidentifikasi dimensi yang memerlukan perhatian khusus.

2. Memantau Kemajuan Pembangunan Daerah

IPM berfungsi untuk menilai efektivitas program pembangunan yang telah dijalankan. Peningkatan IPM dari waktu ke waktu mencerminkan keberhasilan kebijakan publik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sedangkan

penurunan atau stagnasi IPM menjadi indikator perlunya perbaikan strategi pembangunan.

3. Mengidentifikasi Kesenjangan Antarwilayah

Analisis spasial IPM memungkinkan pemerintah daerah mengidentifikasi kesenjangan antarwilayah dalam Kota Depok. Perbedaan nilai IPM antar kecamatan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan afirmatif yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan.

4. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Depok

IPM berfungsi sebagai alat evaluatif untuk menilai efektivitas kebijakan sektoral, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Perubahan capaian IPM dapat digunakan untuk menilai dampak kebijakan publik terhadap kesejahteraan masyarakat.

5. Perencanaan Pembangunan Berbasis Data

IPM mendukung penerapan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Pemerintah Kota Depok dapat menggunakan hasil pengukuran IPM untuk menentukan prioritas pembangunan dan merancang intervensi yang lebih tepat sasaran.

6. Alokasi Sumber Daya yang Lebih Tepat

IPM membantu pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pengalokasian sumber daya publik. Wilayah dengan capaian IPM rendah dapat menjadi fokus intervensi dalam bentuk peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, atau dukungan ekonomi.

7. Membandingkan Kinerja Antar Daerah

Sebagai indikator yang bersifat universal, IPM memungkinkan perbandingan kinerja pembangunan antar kota di Indonesia. Pemerintah Kota Depok dapat memanfaatkan IPM untuk menilai posisi relatif dan mengadopsi praktik pembangunan yang berhasil di daerah lain.

8. Pemantauan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), IPM Kota Depok berperan penting dalam memantau kemajuan pembangunan pada aspek sosial dan ekonomi. Peningkatan IPM mencerminkan keberhasilan dalam mencapai kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

9. Dasar bagi Kebijakan Inklusif

Dengan menganalisis IPM berdasarkan jenis kelamin, kelompok sosial, atau wilayah, Pemerintah Kota Depok dapat merancang kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan yang memastikan setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.

10. Mendorong Partisipasi Publik

Keterbukaan data IPM dapat memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat yang memahami kondisi pembangunan di wilayahnya dapat berkontribusi secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik.

Tabel 3.1 berikut menyajikan rincian perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok beserta komponennya selama periode 2019–2025. Perkembangan **Indeks Pembangunan Manusia** (IPM) Kota Depok menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2019 hingga 2024 dan diproyeksikan terus meningkat pada tahun 2025. Nilai IPM meningkat dari **80,82** pada tahun 2019 menjadi **83,05** pada tahun 2024, kemudian mencapai nilai **84,04** pada tahun 2025. Dengan kenaikan total sebesar 3,22 poin dalam enam tahun, laju pertumbuhan IPM relatif stabil, mencerminkan perbaikan berkelanjutan di tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Walaupun laju pertumbuhan sedikit melambat antara 2024 dan 2025, tren ini menegaskan bahwa pembangunan manusia di Kota Depok telah berada pada jalur keberlanjutan.

Tabel 3.1: Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok dan Komponennya Tahun 2019–2025

Tahun	IPM	Umur Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2019	80,82	74,31	13,91	11,00	15.696
2020	81,14	74,80	13,92	11,28	15.281
2021	81,54	74,97	13,93	11,46	15.420
2022	82,02	75,24	13,94	11,47	15.926
2023	82,53	75,53	13,96	11,58	16.279
2024	83,05	75,82	14,11	11,59	16.640
2025	84,04	76,30	14,21	11,83	17.279

Catatan: Data bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), diolah.

Pada dimensi **kesehatan**, indikator *Umur Harapan Hidup (UHH)* menunjukkan peningkatan yang relatif stabil, dari 74,31 tahun pada 2019 menjadi 75,82 tahun pada 2024, dan mencapai 76,30 tahun pada 2025. Kenaikan sebesar 1,99 tahun selama periode 2019–2025 mengindikasikan perbaikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Meskipun laju peningkatan tahunan cenderung melambat menjelang 2025, kondisi ini merupakan fenomena yang lazim seiring semakin mendekatinya batas biologis alami peningkatan umur harapan hidup.

Pada dimensi **pendidikan**, *Harapan Lama Sekolah (HLS)* dan *Rata-rata Lama*

Sekolah (RLS) sama-sama menunjukkan tren peningkatan tanpa penurunan tajam. Nilai HLS meningkat perlahan dari 13,91 tahun pada 2019 menjadi 14,11 tahun pada 2024, dan kembali naik menjadi 14,21 tahun pada 2025. Di sisi lain, RLS meningkat secara konsisten dari 11,00 tahun pada 2019 menjadi 11,59 tahun pada 2024 dan mencapai 11,83 tahun pada 2025. Peningkatan berkelanjutan pada RLS menunjukkan semakin besarnya proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan menengah, yang berkontribusi langsung terhadap kualitas sumber daya manusia.

Pada dimensi **standar hidup layak**, pengeluaran per kapita riil menunjukkan tren meningkat dari Rp15.696 ribu pada 2019 menjadi Rp16.640 ribu pada 2024, dan mencapai Rp17.279 ribu pada 2025. Kenaikan sekitar 10,1% selama periode tersebut mencerminkan perbaikan daya beli masyarakat yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pemulihan kondisi sosial ekonomi pascapandemi.

Secara keseluruhan, perbandingan antara capaian tahun 2019, 2024, dan proyeksi tahun 2025 menunjukkan bahwa Kota Depok telah memasuki fase konsolidasi pembangunan manusia. Peningkatan yang signifikan pada periode 2019–2024 menjadi fondasi yang kuat bagi capaian yang lebih tinggi pada 2025, meskipun laju pertumbuhan di masing-masing dimensi mulai menunjukkan kecenderungan melambat. Ke depan, fokus pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan lanjutan, pemerataan kesejahteraan ekonomi, dan penguatan layanan kesehatan agar peningkatan IPM dapat berlangsung secara berkelanjutan dan inklusif.

3.2.1 Perkembangan Umur Harapan Hidup di Kota Depok

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator utama dalam dimensi kesehatan pada perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat dan ketersediaan layanan kesehatan di suatu wilayah. Peningkatan UHH mencerminkan keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan, gizi, sanitasi, serta kualitas lingkungan hidup.

Selama periode 2019–2025, UHH Kota Depok menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil. Berdasarkan hasil observasi dan proyeksi statistik, UHH meningkat dari 74,31 tahun pada tahun 2019 menjadi 75,82 tahun pada tahun 2024, dan diperkirakan mencapai 76,30 tahun pada tahun 2025. Peningkatan ini menggambarkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam derajat kesehatan masyarakat serta efektivitas program pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok.

Tabel 3.2 berikut menyajikan rincian perkembangan Umur Harapan Hidup berdasarkan kecamatan di Kota Depok selama periode 2019–2025.

Tabel 3.2: Umur Harapan Hidup Kota Depok Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019–2025 (dalam Tahun)

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Beji	72,08	73,07	72,24	72,26	74,17	75,23	75,24
2	Bojongsari	71,70	72,69	71,86	71,88	73,79	73,28	73,78
3	Cilodong	76,42	77,47	76,59	76,62	78,29	78,31	78,55
4	Cimanggis	76,57	77,62	76,75	76,78	78,45	78,43	78,73
5	Cinere	74,58	75,61	74,75	74,78	76,45	78,47	78,09
6	Cipayung	70,49	71,46	70,65	70,66	72,57	72,67	72,85
7	Limo	72,07	73,06	72,23	72,25	74,16	74,26	74,55
8	Pancoran Mas	71,10	72,08	71,26	71,27	73,18	75,92	75,34
9	Sawangan	70,62	71,59	70,78	70,79	72,70	73,89	73,72
10	Sukmajaya	77,41	78,48	77,59	77,62	79,29	79,42	79,67
11	Tapos	72,18	73,17	72,35	72,37	74,28	72,80	73,62
Kota Depok		74,31	74,80	74,97	75,24	75,53	75,82	76,30

Catatan: Angka tahun 2025 merupakan hasil prediksi berbasis pemodelan statistika berdasarkan input data gabungan: (i) Data Susenas dan Podes BFS, dan (ii) Data hasil survei lapangan oleh Tim. Untuk **Kota Depok** nilai berasal dari angka resmi BPS.

Secara spasial, terdapat variasi capaian UHH antar kecamatan di Kota Depok. Pada tahun 2025, Kecamatan Sukmajaya mencatat nilai UHH tertinggi sebesar 79,67 tahun, diikuti oleh Cimanggis (78,73 tahun) dan Cilodong (78,55 tahun). Sementara itu, Kecamatan Cipayung (72,85 tahun), Bojongsari (73,78 tahun), dan Sawangan (73,72 tahun) masih berada di bawah rata-rata Kota Depok. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas layanan kesehatan dan faktor sosial ekonomi belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah.

Peningkatan yang cukup menonjol terjadi di Kecamatan Pancoran Mas, dengan kenaikan UHH dari 71,10 tahun pada tahun 2019 menjadi 75,34 tahun pada tahun 2025. Kenaikan sekitar 4,24 tahun ini menunjukkan adanya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang cukup signifikan di wilayah tersebut.

Dengan demikian, meskipun tren umum menunjukkan peningkatan positif, Pemerintah Kota Depok perlu menaruh perhatian khusus pada wilayah dengan pertumbuhan UHH yang relatif lambat agar disparitas antarwilayah dapat ditekan. Intervensi pembangunan yang terarah dan berbasis data diperlukan untuk memastikan seluruh kecamatan dapat menikmati manfaat pembangunan kesehatan secara merata dan berkelanjutan.

3.2.2 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Tabel 3.3 berikut menyajikan rincian perkembangan Harapan Lama Sekolah berdasarkan kecamatan di Kota Depok selama periode 2019–2025. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Depok selama periode 2019–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat secara perlahan. Nilai HLS meningkat dari 13,91 tahun pada

tahun 2019 menjadi 14,11 tahun pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan semakin baiknya akses dan peluang penduduk usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal, khususnya pada jenjang pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi, seiring dengan perkembangan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah perkotaan.

Tabel 3.3: Harapan Lama Sekolah di Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2019–2025 (dalam Tahun)

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Beji	15,98	15,99	15,01	15,02	15,04	14,28	15,05
2	Bojongsari	14,80	14,83	13,91	13,92	13,93	13,94	14,06
3	Cilodong	15,66	15,70	14,71	14,73	14,75	14,35	15,67
4	Cimanggis	14,80	14,91	13,91	13,93	13,94	14,47	14,15
5	Cinere	13,93	13,95	13,11	13,13	13,14	14,59	13,85
6	Cipayung	14,43	14,56	13,57	13,57	13,58	13,03	13,83
7	Limo	15,20	15,21	14,28	14,29	14,31	13,96	14,51
8	Pancoran Mas	15,95	15,96	14,98	14,98	15,01	14,33	15,87
9	Sawangan	15,08	15,11	14,17	14,17	14,19	13,95	14,28
10	Sukmajaya	15,28	15,33	14,36	14,38	14,40	14,66	14,56
11	Tapos	13,82	13,83	13,00	13,01	13,02	13,59	13,23
Kota Depok		13,91	13,92	13,93	13,94	13,96	14,11	14,21

Catatan: Angka tahun 2025 merupakan hasil prediksi berbasis pemodelan statistika berdasarkan input data gabungan: (i) Data Susenas dan Podes BPS, dan (ii) Data hasil survei lapangan oleh Tim. Untuk **Kota Depok** nilai berasal dari angka resmi BPS.

Secara spasial pada periode 2019–2024, terdapat variasi capaian HLS antar kecamatan di Kota Depok. Kecamatan Beji, Pancoran Mas, Cilodong, dan Sukmajaya secara konsisten berada pada kelompok dengan nilai HLS tertinggi (di atas 14 tahun sejak awal periode), yang mengindikasikan ketersediaan fasilitas pendidikan serta aksesibilitas sekolah yang relatif lebih baik. Sebaliknya, Kecamatan Cipayung, Bojongsari, dan Tapos cenderung berada pada kelompok dengan nilai HLS terendah, yang menunjukkan bahwa potensi melanjutkan pendidikan formal masih relatif lebih terbatas di wilayah tersebut.

Hampir seluruh kecamatan menunjukkan pola peningkatan HLS yang moderat selama periode 2019–2024, meskipun beberapa wilayah mengalami fluktuasi ringan. Secara umum, kondisi ini mencerminkan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesempatan belajar penduduk usia sekolah di berbagai wilayah Kota Depok, namun masih menyisakan ruang perbaikan dalam hal pemerataan akses pendidikan antarwilayah.

Memasuki tahun 2025, nilai HLS Kota Depok tercatat sebesar 14,21 tahun, yang menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, Kecamatan Pancoran Mas mencatat nilai HLS tertinggi sebesar 15,87 tahun, diikuti oleh Beji (15,05 tahun) dan Cilodong (15,67 tahun). Sementara itu, Kecamatan Cipayung (13,83 tahun), Tapos (13,23 tahun), dan Cinere (13,85 tahun) masih berada pada kelompok dengan nilai HLS yang relatif lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tren umum HLS Kota Depok terus mengalami perbaikan hingga tahun 2025, tantangan pemerataan kualitas dan akses pendidikan antar kecamatan masih persistens. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah yang relatif tertinggal agar manfaat pembangunan pendidikan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Depok.

3.2.3 Rata-rata Lama Sekolah di Kota Depok

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Indikator ini merefleksikan capaian pendidikan yang telah diraih masyarakat dan menjadi salah satu komponen penting dalam dimensi pendidikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selama periode 2019–2024, RLS Kota Depok menunjukkan tren peningkatan yang relatif konsisten. Nilai RLS meningkat dari 11,00 tahun pada tahun 2019 menjadi 11,59 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam akses dan keberlanjutan pendidikan formal penduduk usia dewasa di Kota Depok, seiring dengan peningkatan partisipasi pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi.

Tabel 3.4 berikut menyajikan rincian perkembangan Rata-rata Lama Sekolah berdasarkan kecamatan di Kota Depok selama periode 2019–2025.

Tabel 3.4: Rata-rata Lama Sekolah di Kota Depok Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019–2025 (dalam Tahun)

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Beji	10,82	10,93	10,81	10,84	10,85	11,65	11,48
2	Bojongsari	10,52	10,64	10,52	10,55	10,57	11,17	11,01
3	Cilodong	11,62	11,76	11,60	11,64	11,65	11,80	11,77
4	Cimanggis	11,88	12,06	11,85	11,89	11,91	11,98	11,98
5	Cinere	13,25	13,62	13,20	13,24	13,25	12,16	12,51
6	Cipayung	11,07	11,15	11,06	11,08	11,09	10,65	10,82
7	Limo	11,71	11,90	11,68	11,71	11,72	11,26	11,43
8	Pancoran Mas	11,15	11,21	11,14	11,16	11,17	11,72	11,55
9	Sawangan	10,65	10,72	10,65	10,67	10,67	11,18	11,04
10	Sukmajaya	12,02	12,22	11,99	12,03	12,05	12,36	12,29
11	Tapos	11,96	12,03	11,93	11,96	11,97	10,91	11,27
Kota Depok		11,00	11,28	11,46	11,47	11,58	11,59	11,83

Catatan: Angka tahun 2025 merupakan hasil prediksi berbasis pemodelan statistika berdasarkan input data gabungan: (i) Data Susenas dan Podes BPS, dan (ii) Data hasil survei lapangan oleh Tim. Untuk **Kota Depok** nilai berasal dari angka resmi BPS.

Secara spasial pada periode 2019–2024, RLS di Kota Depok memperlihatkan variasi antar kecamatan yang cukup nyata. Kecamatan Cinere, Sukmajaya, dan Cimanggis secara konsisten berada pada kelompok dengan capaian RLS tertinggi. Sebaliknya, kecamatan seperti Bojongsari, Sawangan, dan Cipayung cenderung berada

pada kelompok dengan RLS terendah, yang mengindikasikan masih adanya ketimpangan capaian pendidikan antarwilayah.

Hampir seluruh kecamatan menunjukkan kecenderungan peningkatan RLS dari tahun ke tahun pada periode 2019–2024, meskipun dengan laju yang bervariasi. Kecamatan Beji dan Pancoran Mas menunjukkan tren peningkatan yang stabil sepanjang periode tersebut, yang mengindikasikan peningkatan akses terhadap fasilitas pendidikan serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan formal.

Memasuki tahun 2025, RLS Kota Depok tercatat meningkat menjadi 11,83 tahun. Pada tahun ini, Kecamatan Cinere tetap berada pada kelompok dengan capaian tertinggi sebesar 12,51 tahun, diikuti oleh Sukmajaya (12,29 tahun) dan Cimanggis (11,98 tahun). Sementara itu, Kecamatan Bojongsari (11,01 tahun), Sawangan (11,04 tahun), dan Cipayung (10,82 tahun) masih menjadi wilayah dengan capaian RLS relatif lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya.

Beberapa kecamatan menunjukkan dinamika perubahan pada tahun 2025. Kecamatan Cinere mengalami penurunan RLS pada periode sebelumnya sebelum kembali meningkat pada tahun 2025, sedangkan Kecamatan Tapos menunjukkan pola fluktuatif yang relatif serupa. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh dinamika migrasi penduduk, perubahan struktur umur, serta masuknya penduduk baru dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tren umum RLS di Kota Depok terus membaik, kebijakan pemerataan akses pendidikan tetap diperlukan untuk menekan kesenjangan antarwilayah.

Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Depok mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan dan memperbaiki kualitas pembelajaran. Meski demikian, kesenjangan antar kecamatan menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terarah. Pemerintah perlu memberikan prioritas pada wilayah dengan capaian pendidikan rendah melalui peningkatan sarana pendidikan, program beasiswa, dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pendidikan anak.

Upaya peningkatan mutu pendidikan juga harus diiringi dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang merata dan relevan dengan kebutuhan masyarakat perkotaan. Program literasi digital, pelatihan vokasional, dan kerja sama antara pemerintah, sekolah, serta sektor swasta dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, pembangunan pendidikan di Kota Depok tidak hanya meningkatkan angka RLS, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan daya saing ekonomi daerah dan kualitas hidup penduduk secara keseluruhan.

3.2.4 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Tabel 3.5 menyajikan rincian perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan menurut kecamatan di Kota Depok selama periode 2019–2025. Secara agregat,

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di Kota Depok menunjukkan kecenderungan meningkat dalam jangka panjang, dari Rp15,70 juta pada tahun 2019 menjadi Rp17,28 juta pada tahun 2025. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp15,28 juta sebagai dampak pandemi COVID-19, tren peningkatan kembali berlanjut sejak tahun 2021 hingga 2025 dengan laju yang relatif stabil.

Tabel 3.5: Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2019–2025 (dalam Rp. Ribu)

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Beji	15.770	16.484	16.544	16.563	17.176	17.492	17.756
2	Bojongsari	12.530	13.098	13.209	13.225	13.832	14.136	14.365
3	Cilodong	12.671	13.245	13.354	13.370	13.977	18.401	17.263
4	Cimanggis	16.884	17.649	17.691	17.712	18.325	18.649	18.920
5	Cinere	21.384	22.353	22.324	22.350	22.963	20.967	22.058
6	Cipayung	10.486	10.961	11.104	11.117	11.724	12.028	12.235
7	Limo	13.969	14.602	14.689	14.706	15.313	15.619	15.863
8	Pancoran Mas	16.654	17.408	17.454	17.475	18.088	17.984	18.395
9	Sawangan	12.968	13.556	13.659	13.675	14.282	14.282	14.620
10	Sukmajaya	19.138	20.005	20.010	20.034	20.647	21.057	21.322
11	Tapos	11.218	11.726	11.857	11.871	12.478	12.773	12.992
Kota Depok		15.696	15.281	15.420	15.926	16.279	16.640	17.279

Catatan: Angka tahun 2025 merupakan hasil prediksi berbasis pemodelan statistika berdasarkan input data gabungan: (i) Data Susenas dan Podes BPS, dan (ii) Data hasil survei lapangan oleh Tim. Untuk **Kota Depok** nilai berasal dari angka resmi BPS.

Terdapat variasi yang cukup nyata antar kecamatan. Kecamatan Cinere dan Sukmajaya tetap berada pada kelompok dengan tingkat pengeluaran tertinggi, dengan nilai yang pada sebagian besar tahun berada di atas Rp20 juta per kapita. Sebaliknya, kecamatan seperti Cipayung, Bojongsari, dan Sawangan masih berada pada kelompok dengan tingkat pengeluaran relatif lebih rendah, yakni pada kisaran Rp12–14 juta per kapita. Perbedaan ini mencerminkan adanya kesenjangan kapasitas ekonomi antar wilayah yang berkaitan dengan akses terhadap peluang kerja, infrastruktur ekonomi, serta karakteristik sosial ekonomi penduduk.

Peningkatan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan mencerminkan perbaikan standar hidup dan daya beli masyarakat, yang merupakan salah satu komponen penting dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, disparitas antar kecamatan yang masih terlihat menunjukkan perlunya penguatan kebijakan afirmatif untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi. Strategi pengembangan sektor produktif lokal, perluasan akses terhadap lapangan kerja formal, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi langkah penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di seluruh wilayah Kota Depok.

3.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok dan Kecamatan

Selama periode 2019–2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Nilai IPM meningkat dari 80,82 pada tahun 2019 menjadi 83,05 pada tahun 2024 (Tabel 3.6). Kenaikan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. Pertumbuhan rata-rata IPM selama periode tersebut mencapai sekitar 0,45 poin per tahun, yang menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Depok mampu mempertahankan momentum pemulihan dan penguatan setelah perlambatan akibat pandemi COVID-19.

Tabel 3.6: Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan di Kota Depok Tahun 2019–2025

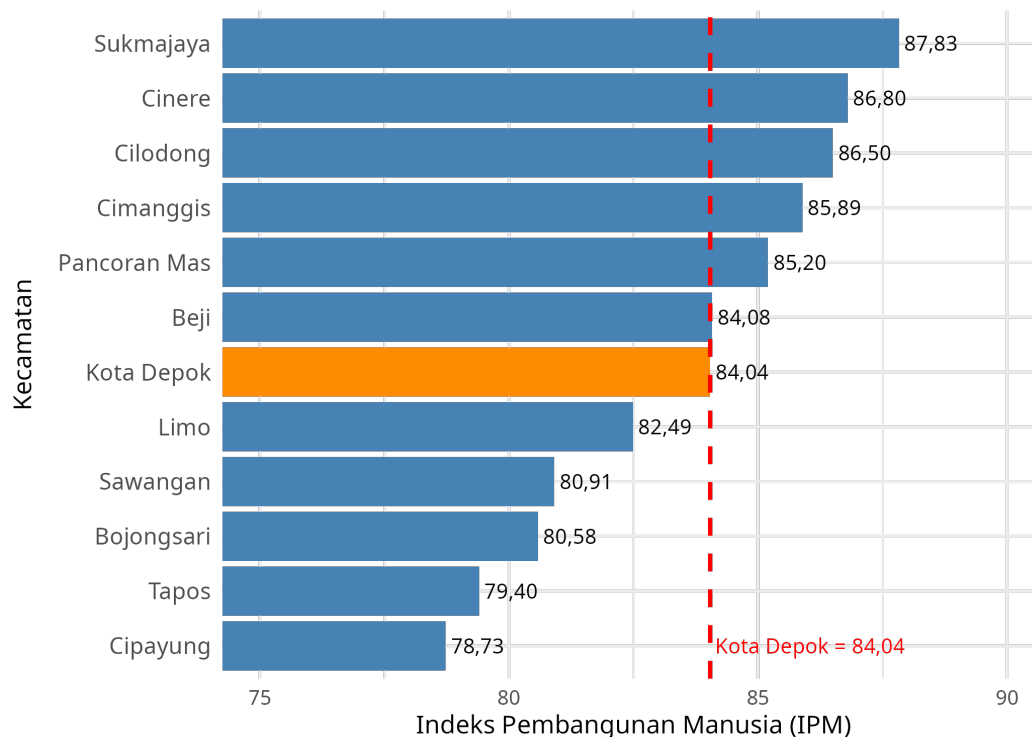
No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Beji	81,51	81,82	81,81	81,85	82,67	83,36	84,08
2	Bojongsari	77,56	77,85	77,86	77,87	78,61	79,23	80,58
3	Cilodong	82,05	82,36	82,36	82,40	83,22	83,84	86,50
4	Cimanggis	84,58	84,90	84,90	84,92	85,74	86,36	85,89
5	Cinere	86,46	86,79	86,78	86,80	87,62	88,25	86,80
6	Cipayung	75,36	75,65	75,65	75,66	76,40	77,02	78,73
7	Limo	80,58	80,89	80,88	80,92	81,66	82,28	82,49
8	Pancoran Mas	81,90	82,21	82,21	82,25	83,07	83,69	85,20
9	Sawangan	77,79	78,09	78,09	78,10	78,84	79,46	80,91
10	Sukmajaya	86,87	87,20	87,19	87,21	88,03	88,65	87,83
11	Tapos	77,35	77,64	77,65	77,66	78,40	79,07	79,40
Kota Depok		80,82	81,14	81,54	82,02	82,53	83,05	84,04

Catatan: Angka tahun 2025 merupakan hasil prediksi berbasis pemodelan statistika berdasarkan input data gabungan: (i) Data Susenas dan Podes BPS, dan (ii) Data hasil survei lapangan oleh Tim. Untuk **Kota Depok** nilai berasal dari angka resmi BPS.

Analisis spasial selama 2019–2024 menunjukkan adanya variasi yang cukup nyata antar kecamatan. Kecamatan Cinere dan Sukmajaya secara konsisten berada pada kelompok dengan IPM tertinggi, dengan nilai IPM di atas 88 pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan kualitas layanan pendidikan, akses kesehatan, serta tingkat kesejahteraan ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan kecamatan lainnya. Sebaliknya, kecamatan seperti Cipayung, Bojongsari, dan Tapos masih berada pada kelompok IPM terendah, dengan nilai IPM umumnya berada di bawah 79 hingga tahun 2024. Meskipun demikian, kecamatan-kecamatan tersebut tetap menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, mengindikasikan adanya perbaikan gradual dalam kualitas hidup penduduk.

Memasuki tahun 2025, nilai IPM Kota Depok diperkirakan meningkat lebih lanjut menjadi 84,04. Pada tahun ini, kecamatan Cinere dan Sukmajaya tetap berada

pada kelompok teratas, meskipun beberapa kecamatan menunjukkan perlambatan laju peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2025 dapat dipandang sebagai fase konsolidasi pembangunan manusia, di mana peningkatan kualitas hidup masyarakat mulai mencapai tingkat yang lebih matang. Tantangan ke depan lebih terfokus pada upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah dan peningkatan kualitas layanan publik agar capaian pembangunan manusia yang tinggi dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh kecamatan Kota Depok.



Gambar 3.1: IPM Tiap Kecamatan di Kota Depok Tahun 2025

Gambar 3.1 menunjukkan perbandingan nilai *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM) antar kecamatan di Kota Depok pada tahun 2025. Secara umum, terlihat adanya variasi yang cukup nyata antar wilayah. Kecamatan **Sukmajaya** menempati posisi tertinggi dengan nilai IPM sekitar **87,83**, diikuti oleh **Cinere**, **Cilodong**, **Cimanggis**, dan **Pancoran Mas** yang masing-masing memiliki nilai IPM di atas **85**. Kelima kecamatan tersebut mencerminkan wilayah dengan capaian pembangunan manusia yang relatif lebih baik dibandingkan kecamatan lain di Kota Depok.

Sementara itu, beberapa kecamatan seperti **Cipayung** dan **Tapos** menunjukkan nilai IPM yang relatif rendah, masing-masing berada di bawah **80**. Kondisi ini mengindikasikan masih terdapat kesenjangan dalam kualitas hidup, pendidikan, maupun kesehatan antar kecamatan. Nilai IPM Kota Depok berada pada kisaran **84,04**, yang ditunjukkan oleh garis vertikal merah pada grafik. Kecamatan **Beji** memiliki nilai yang mendekati nilai Kota Depok, sedangkan **Limo**, **Sawangan**, **Bojongsari**, **Tapos**, dan

Cipayung berada di bawahnya.

Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun capaian pembangunan manusia di Kota Depok relatif tinggi secara agregat, masih terdapat ketimpangan antar kecamatan yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, terutama di bidang pendidikan dan standar hidup layak.

3.4 Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Depok

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator komprehensif yang digunakan untuk menilai kualitas hidup masyarakat suatu wilayah, termasuk Kota Depok. IPM mengukur pencapaian rata-rata masyarakat dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu *kesehatan*, *pendidikan*, dan *standar hidup layak*. Upaya peningkatan IPM Kota Depok memerlukan kebijakan yang terpadu dan berkelanjutan pada ketiga dimensi tersebut.

Berikut beberapa strategi utama yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan capaian IPM secara menyeluruh:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan

- (a) *Pemerataan Akses Pendidikan*: Menjamin seluruh anak usia sekolah, termasuk yang berasal dari keluarga kurang mampu dan wilayah marginal, memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas.
- (b) *Peningkatan Fasilitas dan Sarana Pendidikan*: Melakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, serta melengkapi sekolah dengan fasilitas pembelajaran modern.
- (c) *Peningkatan Kompetensi Guru*: Melaksanakan program pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
- (d) *Penyediaan Beasiswa dan Bantuan Pendidikan*: Memperluas cakupan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dan kurang mampu guna meningkatkan partisipasi pendidikan.

2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

- (a) *Akses Kesehatan yang Merata dan Terjangkau*: Meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas, klinik, dan rumah sakit di seluruh wilayah kota.
- (b) *Kampanye Hidup Sehat*: Melaksanakan program edukasi dan kampanye kesehatan terkait gizi, aktivitas fisik, dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular.

- (c) *Fokus pada Kesehatan Ibu dan Anak*: Memperkuat layanan kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak.
- (d) *Peningkatan Layanan Kesehatan Dasar*: Menjamin terlaksananya imunisasi, pemeriksaan rutin, serta program pencegahan dan deteksi dini penyakit.

3. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

- (a) *Pengembangan UMKM*: Memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan perluasan pasar.
- (b) *Penciptaan Lapangan Kerja*: Mendorong peningkatan kesempatan kerja terutama bagi angkatan kerja muda melalui pelatihan keterampilan dan program kewirausahaan.
- (c) *Peningkatan Infrastruktur Ekonomi*: Mengembangkan infrastruktur publik seperti transportasi, air bersih, dan jaringan listrik untuk mendukung aktivitas ekonomi produktif.
- (d) *Bantuan Sosial Tepat Sasaran*: Menyediakan subsidi dan bantuan sosial bagi kelompok masyarakat rentan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan daya beli.

4. Penanggulangan Kemiskinan

- (a) *Program Pengentasan Kemiskinan*: Melaksanakan program bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin.
- (b) *Akses terhadap Perumahan Layak*: Menyediakan program rumah bersubsidi dan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

5. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

- (a) *Transparansi dan Akuntabilitas*: Mendorong penerapan prinsip pemerintahan yang bersih dan akuntabel dalam seluruh program pembangunan.
- (b) *Digitalisasi Pelayanan Publik*: Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat layanan publik dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan.

6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

- (a) *Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan*: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan.
- (b) *Pemberdayaan Masyarakat*: Melaksanakan program peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan literasi keuangan.

Melalui penerapan strategi-strategi tersebut, diharapkan Kota Depok mampu meningkatkan nilai IPM secara berkelanjutan, tidak hanya melalui peningkatan indikator kuantitatif, tetapi juga melalui penguatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi

faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan manusia di Kota Depok.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk. IPM digunakan untuk menilai capaian pembangunan dalam tiga dimensi dasar, yaitu *kesehatan*, *pendidikan*, dan *standar hidup layak*. Selain menjadi ukuran kinerja pemerintah, IPM juga memiliki fungsi strategis di Indonesia karena digunakan sebagai salah satu dasar dalam penentuan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) antar daerah.

Sebagai indikator komposit, IPM mencerminkan hasil dari berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun sebelumnya. Dengan demikian, perubahan nilai IPM dapat menggambarkan kemajuan atau perlambatan pembangunan di suatu wilayah. Namun demikian, interpretasi terhadap IPM perlu dilakukan secara komprehensif karena ketiga komponennya saling berkaitan dan tidak dapat dianalisis secara parsial tanpa mempertimbangkan konteks sosial ekonomi daerah.

Pada tahun 2025, IPM Kota Depok berdasarkan angka resmi BPS meningkat menjadi sebesar **84,04**, naik dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Secara rinci, **Umur Harapan Hidup (UHH)** Kota Depok mencapai **76,30 tahun**, yang berarti bayi yang lahir pada tahun 2025 diperkirakan memiliki harapan hidup hingga usia tersebut. Sementara itu, **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai **11,83 tahun**, setara dengan tingkat pendidikan hingga kelas 2 SMA. Adapun **Harapan Lama Sekolah (HLS)** penduduk usia 7 tahun ke atas mencapai **14,21 tahun**, yang menunjukkan harapan untuk menempuh pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Selain itu, **pengeluaran per kapita disesuaikan** mencapai **Rp17.279.000,00** per tahun, yang mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat Kota Depok.

Perlu dipahami bahwa tingginya UHH tidak selalu mencerminkan rendahnya tingkat polusi atau kualitas lingkungan yang lebih baik, mengingat mobilitas penduduk

yang tinggi di wilayah perkotaan seperti Depok dapat memengaruhi indikator ini. Demikian pula, RLS dan HLS mencerminkan capaian pendidikan formal yang perlu terus diperkuat melalui peningkatan akses, kualitas sarana pendidikan, dan dukungan kebijakan afirmatif bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

Namun demikian, IPM bukanlah satu-satunya ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia secara menyeluruh. Aspek-aspek lain seperti kesetaraan gender, kesehatan mental, partisipasi sosial, dan tingkat kesejahteraan non-material juga berperan penting dalam menggambarkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi pembangunan manusia sebaiknya juga mempertimbangkan indikator lain seperti *Indeks Pembangunan Gender (IPG)*, *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*, dan *Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM)* agar hasil analisis yang diperoleh lebih komprehensif dan mendekati kondisi faktual masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap perkembangan IPM Kota Depok, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pada setiap komponennya, terutama di wilayah kecamatan yang masih memiliki capaian relatif rendah. Dengan mempertimbangkan hasil yang telah dicapai serta berbagai kendala yang dihadapi, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain sebagai berikut:

1. **Bidang Kesehatan:** Pemerintah Kota Depok perlu memperkuat program pelayanan kesehatan masyarakat melalui pengaktifan kembali Posyandu, peningkatan cakupan imunisasi, dan optimalisasi kegiatan RW Siaga. Upaya promotif dan preventif harus terus digalakkan guna menekan penyakit menular maupun tidak menular.
2. **Bidang Pendidikan:** Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah dapat ditempuh dengan mengintensifkan program Kejar Paket A, B, dan C, serta memastikan seluruh anak usia sekolah mengikuti pendidikan formal. Bagi peserta program kejar paket yang masih dalam usia sekolah, perlu diberikan kesempatan untuk kembali melanjutkan ke pendidikan formal agar kesinambungan pendidikan dapat terjaga.
3. **Bidang Ekonomi dan Sosial:** Pemerintah perlu mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, pelatihan kewirausahaan, dan penyediaan akses permodalan yang inklusif. Program bantuan sosial juga perlu diarahkan secara tepat sasaran agar mampu mendorong peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.
4. **Bidang Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat:** Peningkatan kualitas pembangunan manusia tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi

juga pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan manusia melalui kegiatan edukatif dan kolaboratif lintas sektor.

Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan upaya peningkatan IPM Kota Depok dapat terus berlanjut secara berkesinambungan dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat Kota Depok.

DAFTAR PUSTAKA

- Arima, S., Datta, G. S., & Liseo, B. (2015). *Bayesian Estimators for Small Area Models when Auxiliary Information is Measured with Error*. *Scandinavian Journal of Statistics*, 42, 518–529. <https://doi.org/10.1111/sjos.12120>
- Bae, K., Han, D., & Sohn, H. (2012). Importance of Access to Finance in Reducing Income Inequality and Poverty Level. *International Review of Public Administration*, 17(1), 55–77.
- Chongvilaivan, A., & Kim, J. (2013). Individual income inequality and its drivers in Indonesia: A Theil decomposition reassessment. *Social Indicators Research*, 1–20.
- Dawber, J., Würz, N., & Smith, P. (2019). *The Development of Regional CPIH: Assessment of Small Area Estimation for Regional Expenditure Weights*. Newport (UK): Office for National Statistics.
- de Silva, I., & Sumarto, S. (2013). *Poverty-Growth Inequality Triangle: The Case of Indonesia*. TNP2K Working Paper. [http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/WP4-PovertyTriangle\(1\).pdf](http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/WP4-PovertyTriangle(1).pdf)
- Howkins, J. (2002). *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. Penguin Books Limited.
- Kemenparekraf. (2014). *Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Novkaniza, F., Notodiputro, K. A., Sadik, K., & Mangku, I. W. (2023). Poisson–Lognormal Model with Measurement Error in Covariate for Small Area Estimation of Count Data. *Communication in Mathematical Biology and Neuroscience*, 1–20. <https://doi.org/10.28919/cmbn/7779>
- Pratesi, M. (2016). *Analysis of Poverty Data by Small Area Estimation*. UK: John Wiley & Sons, Inc.
- Rao, J. N. K., & Molina, I. (2015). *Small Area Estimation, Second Edition*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

- Sadik, K., & Notodiputro, K. A. (2006). Metode E-BLUP dalam Small Area Estimation untuk Model yang Mengandung Random Walk. *Forum Statistika dan Komputasi*, 11(2), 37–41.
- Sadik, K. (2009). *Metode Prediksi Tak-Bias Linear Terbaik dan Bayes Berhierarchy untuk Pendugaan Area Kecil Berdasarkan Model State Space*. [Disertasi]. Bogor: IPB University.
- Seidman, K. F. (2005). *Economic Development Finance*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Singh, T., Wang, S., & Carroll, R. J. (2015). Efficient Small Area Estimation when Covariates are Measured with Error Using Simulation Extrapolation. *The 60th ISI World Statistics Congress*, Rio De Janeiro, Brazil.
- The Equality Trust. (2011). Income Inequality: Trends and Measures. *Equality Trust Research Digest*, 2, 1–8.
- Torabi, M. (2011). Small Area Estimation Using Survey Weights with Functional Measurement Error in the Covariate. *Australian & New Zealand Journal of Statistics*, 53(2), 141–155. <https://doi.org/10.1111/j.1467-842X.2011.00623.x>
- Torkashvand, E. (2016). *On Small Area Estimation Problems with Measurement Errors and Clustering*. [Dissertation]. Winnipeg: The University of Manitoba.
- Wan, G., & Zhou, Z. (2004). Income Inequality in Rural China: Regression-Based Decomposition Using Household Data. *WIDER Discussion Papers/World Institute for Development Economics (UNU-WIDER)*, No. 2004/51.
- Wicaksono, E., Amir, H., & Nugroho, A. (2017). The Sources of Income Inequality in Indonesia: A Regression-Based Inequality Decomposition. *ADB Working Paper Series*.
- World Bank. (2016). *Indonesia's Rising Divide*. Washington, DC: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/267671467991932516/Indonesias-rising-divide>
- Wurz, N., Schmid, T., Smith, P., & Tzavidis, N. (2017). Construction of Regional Consumer Price Indices Using Small Area Estimation. *Statistische Woche 2017*, Rostock, Germany.
- Ybarra, L. M. R., & Lohr, S. L. (2008). Small Area Estimation when Auxiliary Information Measured with Error. *Biometrika*, 95(4), 919–931.

Zhu, R., & Zou, G. H. (2014). BLUP Estimation of Linear Mixed-Effects Models with Measurement Errors and Its Applications to the Estimation of Small Areas. *Acta Mathematica Sinica, English Series*, 30(12), 2027–2044. <https://doi.org/10.1007/s10114-014-2707-5>



Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

**Gedung Dibaleka II
Komplek Balaikota Depok Lantai 7
Jalan Margonda Raya No.54 Depok
Telp: (021) 29402276 dan (021) 7764410
Email: diskominfo@depok.go.id**